Koran SINDO Halaman 12 Edisi, Rabu 23 September 2015

Aset Disdikpora Senilai Rp4,4 M Bermasalah

KARANGANYAR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar. Tidak tanggungtanggung, nilai aset yang bermasalah tersebut mencapai Rp4,4 miliar.

Bupati Karanganyar Juliyatmono yang dikonfirmasi membenarkan adanya temuan BPK dalam pengelolaan aset pada Disdikpora. Menurutnya, temuan tersebut bermula dari besarnya nilai aset sehingga menimbulkan kecurigaan lantaran tidak disertai dengan dokumen yang menguatkan.

Bupati mengaku, pihaknya sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan melakukan kroscek di lapangan. Setelah melakukan pemeriksaan langsung, ternyata aset yang dicurigai tersebut tidak tercatat dalam pembukuan Disdikpora. Aset itu meliputi gedung, buku, alat tulis kantor (ATK), komputer, meja kursi, dan beberapa aset lain yang berada di bawah naungan dinas tersebut.

Buruknya pencatatan aset pada Disdikpora tersebut dinilaisebagai akibatkurang tertibnya petugas baik di sekolah maupun unit kerja dalam melakukan pembukuan. Juliyatmono menerangkan, banyak aset yang terbengkalai tapi

tidak dicatat dalam pembukuan. Padahal aset seperti itu juga harus tercatat sehingga saat ada pemeriksaan bisa diketahui asal-muasalnya.

"Setelah saya cek ternyata disebabkan tidak tertibnya petugas dalam mencatat aset. Misalnya, adakomputerrusak beberapa unit, itu tidak dicatat. Padahal, semua harus tersusun dalam pembukuan," tandasnya di sela-sela pembinaan pengelolaan aset dan persediaan barang Kabupaten Karanganyar kemarin.

Pihaknya sudah menginstruksikan Disdikpora agar segera membenahi aset yang bermasalah tersebut. Paling tidak perbaikan pencatatan aset itu harus selesai sebelum akhir 2015. Jika permasalahan aset tidak clear, target Karanganyar mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)dalamlaporankeuangan dikhawatirkan akan terganjal. "Ini harus diselesaikan. Kalau tidak, bisa saja opini WTP dilepas oleh BPK karena kita tidak bisa mengelola APBD 2015 dengan baik," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo mengakutelah membentuk tim pendampingan dari Inspektorat dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

arief setiadi